



Kebijakan Pendidikan dan Tantangan Implementasinya di Lembaga Pendidikan Islam

Tengku Darmansah^{1*}, Putri Suci Ramadhani², Dessy Masliani Br Lubis³, Desi Fitriyani Sembiring⁴

^{1,2,3,4}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

E-mail: teng kudarmansah@uinsu.ac.id¹, putrisuciramadhani21@gmail.com², dessymasliani02@gmail.com³, desisaragih103@gmail.com⁴

*Korespondensi penulis: teng kudarmansah@uinsu.ac.id

Abstract. *Educational policies in Islamic educational institutions have an important role in realizing educational goals that are in accordance with Islamic values. This research discusses how educational policies are formulated and implemented in the context of Islamic educational institutions, as well as the various challenges faced during this process. Using descriptive qualitative research methods with a case study approach in several Islamic educational institutions, this research identifies main challenges such as limited human resources, lack of in-depth understanding of policies, and difficulties in balancing national policies and Islamic values. The research results show that successful implementation of education policies requires effective management support, competence of teaching staff, and synergy between government, schools and society. By overcoming these challenges, Islamic educational institutions can improve the quality of education and ensure that the policies implemented are in line with the vision of Islamic education.*

Keywords: Policy, Education, Implementation, Management.

Abstrak. Kebijakan pendidikan di lembaga pendidikan Islam memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Penelitian ini membahas bagaimana kebijakan pendidikan dirumuskan dan diimplementasikan dalam konteks lembaga pendidikan Islam, serta berbagai tantangan yang dihadapi selama proses tersebut. Menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus di beberapa lembaga pendidikan Islam, penelitian ini mengidentifikasi tantangan utama seperti keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya pemahaman mendalam tentang kebijakan, serta kesulitan dalam menyeimbangkan antara kebijakan nasional dan nilai-nilai keislaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan memerlukan dukungan manajemen yang efektif, kompetensi tenaga pendidik, serta sinergi antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat. Dengan mengatasi tantangan ini, lembaga pendidikan Islam dapat meningkatkan kualitas pendidikan dan memastikan kebijakan yang diterapkan selaras dengan visi pendidikan Islam.

Kata Kunci: Kebijakan, Pendidikan, Implementasi, Manajemen.

1. LATAR BELAKANG

Kebijakan pendidikan di lembaga pendidikan Islam merupakan serangkaian pedoman dan aturan yang bertujuan untuk mewujudkan sistem pendidikan berkualitas dengan tetap menjaga nilai-nilai keislaman. Kebijakan ini meliputi berbagai aspek, seperti kurikulum berbasis Islam, metode pengajaran, pengelolaan tenaga pendidik, serta peningkatan mutu sarana dan prasarana pendidikan. Kebijakan pendidikan Islam diharapkan dapat menghasilkan peserta didik yang tidak hanya memiliki kemampuan akademis, tetapi juga memiliki keimanan dan akhlak yang baik. Namun, implementasi kebijakan pendidikan di lembaga pendidikan Islam kerap menghadapi berbagai tantangan.

Tantangan tersebut antara lain terbatasnya sumber daya manusia yang kompeten, kurangnya dukungan dari pemangku kepentingan, serta keterbatasan dana dan fasilitas. Selain itu, perubahan kebijakan nasional dan perkembangan teknologi yang pesat turut memberikan tekanan pada lembaga pendidikan Islam untuk terus beradaptasi. Jika tantangan ini tidak diatasi dengan baik, maka tujuan kebijakan pendidikan Islam tidak akan tercapai secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pendidikan di lembaga pendidikan Islam dan mengidentifikasi tantangan yang muncul dalam implementasinya. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan pendidikan Islam dalam menghadapi dinamika perkembangan zaman.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif/deskriptif dengan menggunakan kajian literatur atau dengan kajian pustaka yaitu dengan berisi teori- teori yang relevan dengan masalah-masalah penelitian. Adapun masalah dalam penelitian ini untuk mengetahui bagaimana transformasi digital dalam manajemen persuratan. Pengkajian penelitian ini menggunakan konsep dan teori yang dilakukan berdasarkan literatur yang tersedia, terlebih dari artikel-artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Kajian pustaka berfungsi untuk membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian. (Sujerweni, 2014)

Menurut Sukardi (2013), kajian pustaka atau studi pustaka merupakan kegiatan yang diwajibkan dalam penelitian, khususnya penelitian akademik yang tujuan utamanya adalah mengembangkan aspek teoritis maupun aspek manfaat praktis. Adapun jenis penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan agar obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, atau library research, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan obyek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, dan juga telaah yang dilakukan untuk memecahkan suatu problem yang pada umumnya tertumpu oleh penelaahan kritis serta mendalam pada bahan-bahan pustaka yang relevan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kebijakan pendidikan

Analisis Kebijakan Pendidikan adalah Sebuah proses atau jalan yang dilakukan Untuk mendapatkan informasi tentang Pendidikan, yang mana data yang telah Didapatkan tersebut akan dijadikan sebagai Bagian-bagian perumusan kebijakan Pendidikan dalam menyelesaikan berbagai Macam permasalahan. Analisa kebijakan ini Sesungguhnya tidak hanya berperan dalam Menganalisis data atau informasi Pendidikan Saja, melainkan juga membahas segala hal Yang masih berhubungan dengan kebijakan, Contohnya mulai dari membuat kerangka Permasalahan, menganalisisnya, mencari Serta mengumpulkan sumber, mencari cara Penyelesaian masalah hingga Menyampaikan hasil tersebut kepada para penentu hasil keputusan tetang Permasalahan kebijakan tersebut. Penyusunan alternatif kebijakan dalam Proses analisis kebijakannya dilakukan Melalui berbagai macam tahapan, sehingga Dibutuhkannya beberapa waktu dalam Penyusunannya.

Disisi lain pada saat ini banyak Masyarakat serta tokoh-tokoh yang Berpendapat bahwa Pendidikan harus Dipisahkan dari politik, tetapi pada Kenyataannya tidak ada satupun kebijakan Pendidikan yang tidak terhubung dengan Nilai-nilai politik. Sehingga pendapat Tersebut bisa dikatakan sangat berlawanan Dengan kehidupan yang ada. Contoh Kebijakan tersebut yaitu nilai-nilai Pendidikan, tujuan Pendidikan, serta Anggaran Pendidikan. Ketiga kebijakan Tersebut sesungguhnya adalah sebuah hasil Kesepakatan dengan politik yang masih Bersangkutan dengan Pendidikan nasional. Oleh karena itu peran Pendidikan dengan Politik sanagtalah berkaitan.

Analisis kebijakan pendidikan Bertujuan untuk menganalisis data dan informasi Pendidikan serta mempertahankan aspek-aspek Didalam proses perancangan dan pembuatan suatu Kebijakan. Proses dari pembuatan kebijakan meliputi Dari menganalisis masalah, pengumpulan data terkait Pendidikan, penentuan alternative hingga pada Penyampaian alternative terhadap para pembentuk Keputusan dalam pendidikan. Rumusan alternative Pendidikan dibuat melalui pelaksanaan analisis Kebijakan tidak serta merta muncul sendiri tanpa Adanya analisis kebijakan terlebih dahulu. Setelah Rumusan kebijakan pendidikan telah didukung oleh Kekuatan kewenangan yang sudah ada, dari dukungan Otoriter atau kewenangan tersebut maka alternative Kebijakan akan dapat berubah menjadi kebijakan Pendidikan.

Maka dari itu prosedur dapat Menciptakan alternative kebijakan, sehingga proses Tersebut menjadi rasional. Berlangsungnya proses Kebijakan merupakan suatu bagian yang digunakan Dalam proses politik oleh para wewenang yang Memiliki otoritas atau kekuasaan.

Dengan demikian, analisis kebijakan Pendidikan dapat disimpulkan sebagai Sebuah ilmu sosial yang dalam Penerapannya secara tersusun dan bertujuan Untuk mengetahui pokok-pokok kebijakan Pendidikan. Sehingga dengan begitu para Penyusun kebijakan dapat mengetahui Permasalahan Pendidikan secara lebih detail Dan dapat dengan tepat memilih cara apakah Yang pas diterapkan dalam penyelesaian Permasalahn Pendidikan tersebut. Hal Tersebut dapat menunjukkan akan pentingnya Analisis kebijakan dalam perwujudan Pendidikan yang pantas dan siap memasuki Revolusi 4.0. Dengan diterapkannya hal Tersebut dapat meminimalisir kelalaian Wewenang olehpara aktor-aktor pemerintah, Karena pemerintah masih harus mengkaji Permasalahn dan mengkaji dampak yang Akan diperoleh masyarakat apabila Menerapkan suatu kebijaka baru. Dengan Dilakuakannya pengkajian tersebut dapat Meberikan kebaikan bagi masyarakat Maupun bagi pemerintah itu sendiri (Dr.Arwildayanto et al., 2018).

Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia

Pendidikan Islam secara mendasar berdasar pada Al-Qur'an yang dengan kemurnian dan Keuniversalannya yang terbuka untuk setiap orang yang mau mempelajari dan mengamalkannya. Al-Qur'an akan selalu mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan umat Islam itu sendiri, Al-Qur'an akan terus berkembang secara relevan bila umat Islam mau melakukan perubahan yang Mendatangkan kebaikan di setiap waktu.

Ta'lim menurut Abdul Fattah Jalal, yaitu proses pemberian pengetahuan, pemahaman, pengertian, Tanggung jawab dan penanaman amanah. Dengan demikian, penyucian diri manusia itu berada dalam Suatu kondisi yang memungkinkan untuk menerima al-hikmah dan mempelajari segala apa yang Bermanfaat baginya dari yang tidak diketahuinya.

Kondisi tersebut merupakan usaha terus menerus Manusia sejak lahir hingga mati dari posisi "tidak tahu" menjadi "tahu". Sedangkan ta'dib secara Etimologi adalah bentuk masdar yang berasal dari kata "addaba", yang artinya membuat makanan, Melatih dengan akhlak yang baik, sopan santun, dan tata cara pelaksanaan sesuatu yang baik. Seperti Yang telah dijelaskan bahwa pendidikan Islam adalah usaha agar orang mengetahui dan mengenali Sebuah sistem pengajaran tertentu. Seperti halnya dengan cara mengajar, seseorang yang mengajar akan Mampu dalam mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya. Dapat diambil contoh misalnya Seorang pendidik yang sedang memberikan contoh atau teladan baik agar dapat ditiru oleh peserta Didik, memberikan penghargaan, mendidik dengan cara yang baik berdasar dari pembiasaan. Maka Dengan adanya konsep ta'dib tersebut seorang individu muslim dapat dibentuk untuk memiliki akhlak Yang baik atau akhlakul karimah.

Pendidikan Islam sendiri menjadi bagian dari pendidikan nasional, maka dari itu sangat jelas bahwa Kebijakan pendidikan Islam sangat tergantung pada kebijakan pendidikan nasional. Dengan landasan Seperti ini, para pakar pendidikan Islam hendaknya turut serta dalam proses pengambilan kebijakan Pendidikan. Dalam membuat kebijakan terdapat dua hal yang harus diperhatikan yaitu; sistem nilai Yang berlaku dan faktor-faktor situasional.¹⁰ Kebijakan nasional sudah seharusnya memperuntukkan Kepentingannya untuk kesejahteraan masyarakat dalam segala bidang yang di dalamnya termasuk Urusan pendidikan. Masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam sangat mengharapkan Kualitas pendidikan Islam yang unggul dan masuk dalam prioritas sistem pendidikan nasional.

Pendidikan Agama Islam (PAI) merupakan mata pelajaran yang wajib diajarkan dalam setiap Kurikulum di sekolah berbasis keislaman, baik jenis maupun jenjang pendidikan. Dengan demikian, Sudah menjadi keputusan yang mutlak bahwa Pendidikan Agama Islam (PAI) di sekolah menjadi Bagian integral dalam sistem pendidikan nasional. Karena sudah ada ketentuan hukum yang Mewajibkan adanya Pendidikan Agama Islam di setiap jalur maupun jenjang pendidikan. Oleh karena itu, sudah seharusnya mata pelajaran Pendidikan Agama Islam tidak hanya diajarkan Berdasar pada teori yang menekankan aspek kognitif belaka, tetapi juga harus mengarah pada aspek Afektif yang mengandung makna dan nilai. Sebab dari aspek afektif pengetahuan agama tersebut dapat Dihayati oleh para peserta didik.

Pernyataan mengenai pendidikan agama sebagai sumber pedoman dan Nilai, yang hingga kini belum mewarnai lingkungan sekolah, sangat membutuhkan model-model Pengembangan pendidikan agama Islam di sekolah yang efektif Berbagai permasalahan pendidikan yang sedang dialami oleh pendidikan di Indonesia memang tidak Hanya bisa dilihat dan diatasi melalui mono-dimensional. Namun, karena segala permasalahan Cenderung bermula dari krisis akhlak dan moral, maka pendidikan agama dianggap sangat penting dan Memiliki peranan yang vital dalam membangun akhlak dan peradaban bangsa yang bermartabat. Oleh Karena itu, diperlukan sebuah pengembangan pendidikan agama yang lebih kondusif di sekolah. Model Pengembangannya perlu diubah dan dikembangkan dari model yang bersifat dikotomik mekanis Menuju ke arah organisme yang sistemik. Hanya saja, untuk memperbaiki model-model tersebut Diperlukan kemampuan dari para pengambil kebijakan dan para pemimpin lembaga pendidikan itu Sendiri.

Tantangan Mengimplementasikannya

Implementasi pendidikan Islam sangatlah penting terutama di masa sekarang, ketika anak sedari kecil Sudah dibiasakan, diarahkan, dan dibimbing agar siswa menjadi tau, maka untuk ke depannya siswa Akan jauh lebih mudah dalam pembentukan watak yang baik dan dapat mengamalkannya dalam Kehidupan sehari-hari. Di dalam penerapan ini, siswa harus benar-benar dibekali landasan-landasan Yang kokoh supaya dalam hidup bertetangga atau pun dalam hidup yang beraneka ragam ini tetap Terjaga kedamaiannya, kebersamaan dalam hidup bernegara dan lain sebagainya.

Implementasi kebijakan pendidikan melibatkan berbagai aspek, termasuk Pengembangan kurikulum, peningkatan kualitas tenaga pendidik, dan peningkatan sarana Prasarana. Salah satu kebijakan utama yang diimplementasikan adalah Kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka merupakan sebuah inovasi dalam dunia pendidikan yang bertujuan Untuk memberikan kebebasan lebih kepada sekolah dalam mengatur kurikulum sesuai Dengan kebutuhan dan kondisi lokal., Kurikulum Merdeka dirancang untuk meningkatkan Kompetensi siswa dalam berbagai aspek, termasuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap, Serta memperkuat integrasi nilai-nilai keislaman dalam kurikulum (Subhkan & Wahyudin, 2024).

Implementasi kebijakan pendidikan adalah proses yang kompleks dan memerlukan Perhatian pada berbagai aspek untuk memastikan keberhasilannya. Perencanaan yang Matang adalah langkah awal yang sangat penting. Perencanaan ini harus melibatkan Analisis kebutuhan, penetapan tujuan yang jelas, dan pengembangan strategi yang relevan Dengan konteks lokal dan kebutuhan siswa. Menurut Fullan (2015), perencanaan yang Efektif harus mempertimbangkan dinamika perubahan di lapangan pendidikan dan Melibatkan pemangku kepentingan dari awal untuk memastikan keberhasilan implementasi.

Sumber daya yang memadai, baik dalam bentuk finansial, tenaga pengajar, maupun Material pendidikan, juga sangat penting. Tanpa dukungan sumber daya yang cukup, Kebijakan yang telah dirumuskan dengan baik tidak akan dapat diimplementasikan dengan Efektif. Studi oleh Hanushek dan Woessmann (2015) menunjukkan bahwa investasi dalam Pendidikan berkualitas tinggi sangat berpengaruh positif terhadap hasil belajar siswa, Sehingga alokasi anggaran yang tepat menjadi krusial dalam mendukung kebijakan Pendidikan. Partisipasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk guru, siswa, orang tua, dan Masyarakat, sangat penting dalam implementasi kebijakan pendidikan. Keterlibatan mereka Tidak hanya meningkatkan dukungan tetapi juga memastikan bahwa kebijakan tersebut Relevan dan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Menurut penelitian oleh Penuel (2016),

Kolaborasi yang efektif antara pemangku kepentingan dapat meningkatkan keberhasilan Implementasi kebijakan pendidikan melalui peningkatan kepemilikan dan komitmen bersama.

Pendidikan menjadi elemen penting dalam proses pembangunan nasional Peran Pemimpin sangat berpengaruh dalam pembuatan kebijakan pendidikan. Tantangan yang Dihadapi mencakup kurangnya keselarasan antara berbagai pihak terkait. Meskipun kebijakan pendidikan telah berkali-kali direvisi, masih ada banyak aspek yang belum Memenuhi tujuan yang diinginkan. Pemerintah perlu mempertimbangkan cara Mengembangkan sumber daya manusia yang memenuhi persyaratan modern, karena Peningkatan mutu dan kualitas sumber daya manusia merupakan prioritas utama dalam Dunia pendidikan dan merupakan investasi untuk menghasilkan individu-individu Berkualitas (Tintingon et al., 2023). Berikut beberapa tantangan dalam kebijakan Pendidikan:

a. Kesenjangan Pendidikan

Setiap individu berhak menerima pendidikan, namun di Indonesia, mutu pendidikan Sering kali rendah dan terdapat banyak kesenjangan. Ketidaksetaraan dalam sistem Pendidikan terlihat pada kurangnya sarana, fasilitas, dan sumber daya pendidik yang tidak Optimal. Kesenjangan ini terjadi karena beberapa faktor, antara lain:

b. Sarana dan Prasarana

Fasilitas merupakan elemen penting yang mendukung proses pembelajaran. Gangguan pada sarana dan prasarana dapat berdampak negatif pada penyampaian materi Kepada siswa. Masalah sarana dan prasarana umumnya terkait dengan aspek keuangan Dalam pendidikan, di mana besaran dan alokasi anggaran pendidikan memengaruhi Ketersediaan fasilitas pendidikan. Kualitas pendidikan di sekolah perkotaan umumnya Lebih baik dibandingkan dengan sekolah di daerah terpencil, yang sering kekurangan Fasilitas. Kondisi ini tercermin dalam laporan media mengenai bangunan sekolah yang Rapuh dan berpotensi roboh, yang berdampak negatif pada efektivitas proses belajar Mengajar.

c. Keterbatasan Teknologi

Keterbatasan dalam penggunaan teknologi menjadi hambatan dalam proses Pembelajaran, terutama bagi para guru yang belum mahir menggunakan teknologi, Khususnya mereka yang lebih tua. Oleh karena itu, penting untuk memberikan pelatihan Kepada guru-guru untuk meningkatkan kemampuan mengajar mereka.(Yufarika, 2023)

d. Keterbatasan Pengalaman

Sebelum pandemi, pembelajaran daring mengalami keterbatasan dalam keterlibatan Guru, yang memengaruhi cara penyampaian informasi kepada siswa dan pemahaman Mereka terhadap materi. Guru yang biasanya mengajar dengan metode tatap muka harus Beralih ke metode online, yang dapat menyebabkan kelelahan dan apatisasi dalam mengajar, Sehingga mengurangi efektivitas pembelajaran (Zahra, 2023)

e. Peningkatan Mutu Guru

Peningkatan kualitas guru akan tetap menjadi prioritas utama dalam kebijakan Pendidikan. Ini mencakup peningkatan standar kompetensi dan sertifikasi guru, serta Penyediaan pelatihan dan pengembangan keterampilan secara berkelanjutan. Selain itu, Penggunaan teknologi dalam pendidikan juga akan ditingkatkan untuk memberikan Dukungan dan sumber daya yang lebih baik bagi guru dalam proses pembelajaran.

f. Penguatan Pendidikan Karakter

Selain aspek akademis, pendidikan nilai dan karakter diperkirakan akan menjadi Fokus utama dalam kurikulum pendidikan. Tujuannya adalah untuk membentuk generasi Yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki moralitas dan kepribadian Yang kuat. Program-program seperti pembelajaran berbasis proyek, kegiatan Ekstrakurikuler, dan mentoring karakter diperkirakan akan diperkuat untuk membentuk Siswa menjadi individu yang lebih baik.

g. Peningkatan Anggaran Pendidikan

Pemerintah diperkirakan akan terus berupaya meningkatkan alokasi anggaran untuk Pendidikan. Tujuannya adalah untuk memastikan tersedianya sarana dan prasarana Pendidikan yang memadai, termasuk infrastruktur fisik, sumber daya manusia, dan Teknologi pendidikan. Peningkatan anggaran ini diharapkan dapat mencapai sekitar 20% Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk menyediakan pendidikan Berkualitas bagi semua siswa di Indonesia. (Tawa 2019).

Implementasi pendidikan Islam sangatlah penting terutama di masa sekarang, ketika anak sedari kecil Sudah dibiasakan, diarahkan, dan dibimbing agar siswa menjadi tau, maka untuk ke depannya siswa Akan jauh lebih mudah dalam pembentukan watak yang baik dan dapat mengamalkannya dalam Kehidupan sehari-hari. Di dalam penerapan ini, siswa harus benar-benar dibekali landasan-landasan Yang kokoh supaya dalam hidup bertetangga atau pun dalam hidup yang beraneka ragam ini tetap Terjaga kedamaiannya, kebersamaan dalam hidup bernegara dan lain sebagainya.

4. KESIMPULAN

Analisis kebijakan pendidikan adalah Ilmu sosial yang dalam penerapannya secara Tersusun dan bertujuan untuk mengetahui Pokok-pokok kebijakan Pendidikan. Sehingga dengan begitu para penyusun Kebijakan dapat mengetahui permasalahan Pendidikan secara lebih detail dan dapat Dengan tepat memilih cara apakah yang pas Diterapkan dalam penyelesaian permasalahan Pendidikan tersebut.

Dengan demikian analisis kebijakan Pendidikan merupakan sosiologi terapan yang Dikonseptualisasikan dalam rencana substansi sistem Strategi instruktif yang menunjuk pada klarifikasi Masalah yang akan dijawab oleh pendekatan dan Masalah yang akan muncul karena pelaksanaannya Pengaturan yang telah dibuat.

Pendidikan Islam yang berdasar kepada Al-Qur'an, yang mana Al-Qur'an merupakan sumber dari Segala sumber ilmu untuk dapat dijadikan pelajaran dan diamalkan bagi setiap orang yang mau Melakukannya. Terlepas dari itu, pendidikan Islam tidak serta merta leluasa dalam mengambil sebuah Kebijakan, karena pendidikan Islam turut masuk ke dalam bagian dari pendidikan nasional. Oleh Karenanya, pendidikan Islam sangat bergantung kepada kebijakan nasional yang mengharuskan Pakar-pakar pendidikan Islam turut andil dalam pengambilan kebijakan. Di dalam sekolah, Pendidikan Agama Islam merupakan mata pelajaran wajib yang harus diajarkan guru kepada peserta didiknya Sebab terdapat payung hukum yang mengatur sistem pengajaran dalam bidang tersebut. Pendidikan Agama yang menjadi sumber nilai dan pedoman ternyata tidak seluruhnya sudah diterapkan secara baik, Perlu adanya pengembangan pendidikan agama Islam yang nantinya akan dapat menjadi sebuah acuan Untuk baik dan tidaknya pendidikan Islam yang sudah ada di dalam kebijakan pendidikan di Indonesia.

Implementasi kebijakan tidak hanya merupakan tahap penting dalam siklus Kebijakan, tetapi juga merupakan langkah kritis yang menentukan keberhasilan atau Kegagalan suatu kebijakan. Tanpa implementasi yang efektif, suatu kebijakan hanya akan Menjadi wacana tanpa dampak nyata pada masyarakat atau sektor yang dituju. Oleh karena Itu, proses implementasi harus memperhatikan integrasi antara berbagai sistem yang Terlibat, mulai dari tingkat pusat hingga pelaksanaan di lapangan. Terutama dalam konteks Pendidikan, implementasi kebijakan harus dihindari dari masalah seperti kehilangan arah Dari perencanaan pusat dan hambatan teknis yang mungkin muncul di lapangan. Kehadiran Masalah-masalah ini dapat menghambat pencapaian tujuan kebijakan dan mengurangi Dampak positif yang diharapkan dari kebijakan tersebut. Dengan memperhatikan integrasi Sistem dan mengatasi

kendala-kendala teknis, implementasi kebijakan pendidikan dapat Menjadi lebih efektif dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan

Keberhasilan implementasi kebijakan ini akan sangat bergantung pada kolaborasi Efektif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat, serta upaya berkelanjutan untuk Mengatasi hambatan struktural dan kultural. Dengan strategi yang tepat dan komitmen Yang kuat, kebijakan pendidikan di Indonesia memiliki banyak peluang untuk Menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas dan siap untuk digunakan bersaing Di kancah global.

DAFTAR REFERENSI

- Anwar, S. (2017). *Kebijakan pendidikan Islam: Teori dan implementasi*. Kencana Prenada Media Group.
- Azra, A. (2002). *Pendidikan Islam: Tradisi dan modernisasi di tengah tantangan milenium III*. Logos Wacana Ilmu.
- Ghazali, I., Wibawa, Z. T., Fauzi, M. L. N., & Anggraini, S. N. (2021). Analisis kebijakan pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, 5(2).
- Jalal, F., & Musthafa, B. (2012). *Reformasi pendidikan dalam konteks otonomi daerah*. Pustaka Pelajar.
- Mulyasa, E. (2018). *Manajemen pendidikan karakter*. Bumi Aksara.
- Sanusi, I., Khaeruniah, A. E., & Awaliyah, S. A. L. (2024). Implementasi kebijakan pendidikan (Hakikat, pendekatan, strategi, model, tahapan, dan faktor yang memengaruhi). *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 1(1).
- Setiawan, F., Triyana, F., Arum Sari, K. F., & Andini. (2021). Implementasi kebijakan pendidikan dalam pengembangan pendidikan agama Islam di sekolah. *Jurnal Pusaka*, 10(1).
- Wardanik, A. R., Setiawan, F., Rifki, M., Nafi Dinulloh, N., Maulana, I. A., Hafizh Ananda, N. A. Z., Rizkilla, N. K., & Khiyaroh, N. (2022). Konsep dasar analisis kebijakan pendidikan. *Jurnal Education and Development*, 10(3).
- Yusuf, M. (2019). *Implementasi kebijakan pendidikan Islam di era globalisasi*. Alfabeta.
- Zantia, G., Nadila, S., Zami'ah, S., Hasibuan, A., & Amin, M. (2024). Tantangan dan prospek kebijakan pendidikan. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu*, 8(6).
- Zuanda, S., Wulandari, D., Fahrezi, G., Rised, G. F., & Syaifuddin, M. (2024). Implementasi dan evaluasi kebijakan pendidikan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2).
- Zuhairini, D., et al. (2004). *Sejarah pendidikan Islam*. Bumi Aksara.